



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa, 22 Nopember 2011  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : 1. Membahas masalah TKI di Luar Negeri yang menghadapi ancaman hukuman mati;  
2. Membahas masalah karyawan PT. Freeport Indonesia;  
3. Lain-lain.  
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 39 orang dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, izin 2 orang.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dimulai pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN**

**A. PERMASALAHAN TKI**

Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat kerja gabungan (Rakergab) dengan Kemenakertrans RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepolisian RI untuk menyelesaikan permasalahan TKI secara integral antara lain :

1. Kelanjutan Moratorium Penempatan TKI di Malaysia dan negara-negara lain.
2. Penandatanganan kesepakatan bilateral antara Pemerintah dengan negara tujuan penempatan.
3. Perlunya perlindungan TKI dari ancaman hukuman mati.
4. Harus ada jaminan law enforcement (penegakan hukum) terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah dengan negara tujuan penempatan.

**B. PERMASALAHAN PT. FREEPORT**

Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat kerja gabungan (Rakergab) dengan Kemenakertrans RI, Kementerian ESDM, KAPOLRI, PANGlima (KASAD) TNI untuk membahas permasalahan ketenagakerjaan PT. Freeport Indonesia :

1. Mengenai perlunya kesepakatan yang terkait materi yang bersifat *financial* dan *non financial*.
  2. Meminta penjelasan tentang penggunaan aparat keamanan di wilayah PT. Freeport.
- C.** Merevisi Permenakertrans RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Terhadap Pencapaian Hidup Layak.
- D.** Semua persoalan Ketenagakerjaan yang dibahas dalam Raker hari ini harus segera diselesaikan oleh Kemenakertrans RI.

**Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB.**

Jakarta, 22 Nopember 2011  
Pimpinan Komisi IX DPR-RI  
Ketua,

  
dr. Ribka Tjiptaning  
A-342